



**KEMANDIRIAN DAERAH DAN PROSPEK EKONOMI  
WILAYAH KALIMANTAN**

Joko Tri Haryanto  
Badan Kebijakan Fiskal

Alamat Korespondensi: djohar78@gmail.com

**INFORMASI ARTIKEL**

Diterima Pertama  
12 Juni 2018

Dinyatakan Diterima  
21 Desember 2018

**KATA KUNCI:**  
Desentralisasi fiskal, metode kuadran,  
*share, growth*

**KLASIFIKASI JEL:**  
H53, Q18

**ABSTRACT**

*Decentralization of the reform era, began on January 1, 2011, aimed at having the goal of achieving regional independence, especially in supporting the implementation of development and growth of the region, excellent service to the community in order to develop all the potential of the region optimally. Aspects of regional independence and economic prospects in the future then became a key word that must be realized including in Kalimantan, known as a region rich in natural resources. In some cases, the wealth of natural resources does not affect the welfare of the people. To analyze regional independence and economic prospects in the future, this study uses the analysis of share and growth and quadrant methods. From the results of the highest share of the region is East Kalimantan Province. While from growth analysis, the highest is Balangan Regency. Using quadrant method, seven regions are in quadrant I, sixteen regions are in quadrant II, thirteen areas are in quadrant III, most of them in quadrant IV. For the government itself, the areas that are in quadrant IV can be used as the main recommendation of taking and implementing the policy of acceleration of economic growth and development in the region.*

**ABSTRAK**

Desentralisasi era reformasi dimulai sejak 1 Januari 2011, bertujuan memiliki tujuan pencapaian kemandirian daerah khususnya dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan daerah, pelayanan prima kepada masyarakat demi mengembangkan seluruh potensi daerah secara optimal. Aspek kemandirian daerah dan prospek ekonomi ke depan kemudian menjadi kata kunci yang harus diwujudkan termasuk di Kalimantan yang dikenal sebagai daerah kaya sumber daya alam. Dalam beberapa kasus, kekayaan sumber daya alam justru tidak memberikan dampak kesejahteraan kepada masyarakat. Untuk menganalisis kemandirian daerah dan prospek ekonomi ke depan, kajian ini menggunakan analisis *share* dan *growth* serta metode kuadran. Dari hasil *share* daerah paling tinggi adalah Provinsi Kalimantan Timur. Sementara dari analisis *growth*, yang paling tinggi adalah Kabupaten Balangan. Menggunakan metode kuadran, tujuh daerah berada di kuadran I, enam belas daerah berada di kuadran II, tiga belas daerah berada di kuadran III, sebagian besar lainnya di kuadran IV. Bagi pemerintah sendiri, daerah-daerah yang berada di kuadran IV ini dapat dijadikan rekomendasi utama pengambilan sekaligus implementasi kebijakan percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah.

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan definisi menurut Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat (Sasana, 2011). Oleh Handayani (2009), dijelaskan bahwa otonomi membawa dua implikasi khusus bagi pemerintah daerah yaitu semakin meningkatnya biaya ekonomi (*high cost economy*) sekaligus efisiensi dan efektivitas. Dengan demikian dapat dilihat bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal membutuhkan dana yang memadai khususnya bagi implementasi di level daerah (Rondinelli, 1989). Peneliti lainnya, Khusaini (2006) menyebutkan bahwa desentralisasi merupakan bentuk pemindahan tanggung jawab, wewenang dan sumber-sumber daya baik personal, pendanaan serta beberapa hal lainnya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pada tahun 2009, hasil penelitian Adi menambahkan bahwa desentralisasi dapat diartikan juga sebagai pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan anggaran atau keuangan baik secara administrasi maupun pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat.

Oleh karenanya salah satu makna desentralisasi fiskal dalam format penyerahan otonomi di bidang keuangan kepada daerah-daerah merupakan suatu proses pengintensifikasikan peranan dan sekaligus pemberdayaan daerah dalam pembangunan (Oates, 1972, 2011). Desentralisasi fiskal juga memerlukan adanya pergeseran beberapa tanggung jawab terhadap pendapatan (*revenue*) dan atau pembelanjaan (*expenditure*) ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah (Bawono, 2008). Dalam perspektif teoritis, pelaksanaan desentralisasi fiskal juga didasarkan kepada tujuan pencapaian kemandirian daerah khususnya dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan daerah serta pelayanan prima kepada masyarakat (Agustina, 2013). Dengan tercapainya aspek kemandirian tersebut maka daerah-daerah akan mampu mengembangkan potensinya dalam kapasitas yang optimal (Litvak, 1998). Kemandirian daerah tersebut akan berdampak positif terhadap penurunan beban ketergantungan terhadap APBN khususnya melalui komponen transfer ke daerah dan dana desa (Sularso & Restianto, 2011).

Secara historis, pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia sudah dimulai sejak periode Orde Lama, kemudian mengalami pasang surut di jaman Orde Baru. Periode desentralisasi fiskal di era reformasi sendiri secara resmi dimulai sejak 1 Januari 2011 dengan perubahan mendasar pada titik tolak pelaksanaan desentralisasi fiskal di level kabupaten/kota. Penyerahan titik tolak pelaksanaan desentralisasi fiskal kepada kabupaten/kota didasarkan kepada pertimbangan upaya untuk memotong rantai birokrasi selain pemerintah kabupaten/kota dianggap menjadi pihak yang paling mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya (Wasistiono, 2010). Tujuan besar lainnya yang hendak dicapai dengan adanya pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah menciptakan reformasi dan efisiensi belanja pemerintah.

Efisiensi belanja pemerintah dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi ketika tidak mungkin lagi realokasi sumber daya yang dilakukan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hruza, 2015). Dengan nomenklatur lain, efisiensi belanja pemerintah diartikan ketika setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah menghasilkan kesejahteraan masyarakat yang paling optimal (Kurnia, 2006).

Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal itu sendiri, dikenal adanya filosofi *money follow function* sebagai prinsip utama yang harus diperhatikan dan dilaksanakan. Prinsip tersebut mengandung makna bahwa segala bentuk penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, seyogyanya harus disertai dengan penyerahan sumber-sumber pendanaannya. Hal ini menjadi *urgent* ketika kapasitas dari pemerintah daerah tersebut pada awalnya diasumsikan memiliki banyak keterbatasan dengan prioritas kebutuhan yang sangat beragam (Bahl, 2000). Pada level implementasi, prinsip *money follow function* tersebut kemudian diselaraskan ke dalam bentuk kerangka kebijakan melalui UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Di dalam regulasi, tersebut pemerintah menyiapkan mekanisme Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagai tindak lanjut dari filosofi tersebut. Dalam pendekatan lainnya, mekanisme perimbangan keuangan tersebut disusun sebagai salah satu cara untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan antar daerah di era desentralisasi fiskal ketika sistem kompetisi antar daerah bersifat sempurna (Kharisma, 2013).

Spesifik terkait dengan mekanisme Transfer ke Daerah itu sendiri, terdiri dari komponen Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Otonomi Khusus bagi pemerintah NAD, Papua, Papua Barat dan Keistimewaan Provinsi DIY. Dilihat dari peruntukannya, pengalokasian DBH dan DAU termasuk dalam kategori *block grant* yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antar daerah (*horizontal imbalances*) yang mungkin akan semakin meningkat di era desentralisasi fiskal. Sedangkan pengalokasian DAK, lebih dirasakan memiliki sifat sebagai *specific allocation grant* yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan antara pemerintah pusat dan daerah (*vertical imbalances*) (Mardiasmo, 2004). Bagaimana pemerintah harus mampu menjaga level keseimbangan pendanaan antara pusat dan daerah ini ternyata memiliki dampak yang luar biasa terutama di era Orde Baru ketika beberapa daerah kemudian merasa dirugikan karena beberapa bentuk kekayaan sumber daya alamnya hanya dihabiskan dan dikoleksi oleh pemerintah pusat tanpa memberikan dampak kepada daerah itu sendiri (Simanjuntak, 2015).

Dalam perjalanannya, pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia memberikan dampak yang multitafsir. Beberapa peneliti merasa yakin bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia khususnya sejak periode Orde Reformasi, justru semakin jauh dari tujuan awal dijalankannya mekanisme tersebut terutama jika dilihat dari kinerja per sektoral. Sebagai contoh penelitian yang dilakukan oleh Yatiman & Arif Pujiyono (2013) dengan menganalisis efisiensi teknis anggaran belanja sektor kesehatan di Provinsi DIY selama periode desentralisasi fiskal tahun 2008-2010. Di dalam kesimpulannya disebutkan bahwa secara umum Provinsi DIY di periode tahun tersebut masih masuk dalam kategori in-efisiensi teknis biaya kesehatan. Hal ini ditemukan melalui pencapaian nilai efisiensi teknis biaya untuk masing-masing kabupaten/kota di wilayah Provinsi DIY yang berada di bawah efisiensi teknis sistem. Beberapa daerah yang masih terkendala efisiensi teknis biaya kesehatannya diantaranya Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul. Sementara daerah yang sudah memiliki efisiensi teknis biaya adalah Kota Yogyakarta.

Untuk lokus penelitian yang sama di Provinsi DIY, Tjahjono & Rina Oktavianti (2016) juga menganalisis dengan titik berat diarahkan kepada pengaruh rasio efektivitas PAD, DAU dan

DAK terhadap tingkat kemandirian keuangan daerahnya. Kesimpulan yang paling penting dihasilkan adalah rasio efektivitas PAD, DAU dan DAK ternyata memiliki pengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Artinya Pemerintah Provinsi DIY harus betul-betul memperhatikan berbagai kebijakan di dalam komponen tersebut khususnya yang terkait PAD, karena keseluruhan komponen tersebut memiliki dampak signifikan positif terhadap pencapaian aspek kemandirian daerah. Ketika banyak kebijakan Provinsi DIY tidak efektif mengakselerasi PAD maka dikhawatirkan akan mengganggu pencapaian kemandirian daerah. Karena kebijakannya masih ditetapkan oleh pemerintah pusat, maka rasio efektivitas DAU dan DAK untuk Provinsi DIY dimaknai sebagai upaya meningkatkan kualitas penggunaan DAU dan DAK.

Dampak desentralisasi fiskal terhadap kinerja sektor pendidikan khususnya disparitas akses pendidikan dasar juga menjadi perhatian penelitian yang dilakukan oleh (Doriza, dkk, 2012) meski memberikan hasil positif. Menggunakan metode analisis data panel dari sekitar 440 kabupaten dan kota di Indonesia, Doriza menyimpulkan beberapa hal diantaranya: 1) dari sisi desentralisasi fiskal itu sendiri, instrument fiskal yang bersifat khusus seperti DAK ternyata memiliki dampak yang lebih signifikan dibandingkan DAU yang bersifat umum; 2) DAK pendidikan nyata memberikan dampak penurunan disparitas akses pendidikan di tingkat SMP; 3) PAD secara signifikan memperlebar disparitas pendidikan baik di tingkat SD maupun SMP; 4) untuk tingkat SD, banyak variabel sosial ekonomi yang tidak signifikan dampaknya terhadap disparitas akses pendidikan karena sudah dianggap hal yang bersifat wajib namun 4) hal ini belum berjalan untuk kasus lainnya di level SMP dimana level kesejahteraan masyarakat ternyata menjadi salah satu pendorong utama terjadinya disparitas pendidikan masyarakat melalui tekanan persepsi kewajiban bekerja untuk usia produktif.

Sementara itu, beberapa peneliti justru menemukan fakta yang mampu menjawab sinyalemen negatif yang dipremiskan oleh penelitian sebelumnya, seperti contoh analisis yang dilakukan oleh Sasana (2009) ketika menghitung dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, kesenjangan antar daerah dan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah. Desentralisasi fiskal memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah sekaligus meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Hal yang sama juga terjadi pada proses penyerapan tenaga kerja yang terbukti positif signifikan dipengaruhi oleh kualitas kinerja pemerintah daerah yang meningkat di era desentralisasi fiskal. Makin meningkatnya kapasitas pemerintahan daerah juga ditemukan di dalam kajian (Sumarsono, 2009) yang mengambil lokasi Kota Malang tahun 1999-2004. Secara ringkas Sumarsono menjelaskan bahwa rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) Kota Malang terus meningkat secara signifikan yaitu 4,8-7,3 % lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 5 %. Temuan lainnya adalah adanya efisiensi belanja publik yang besar di Kota Malang dengan produktivitas masyarakat relatif tinggi dibandingkan pembelanjaan publiknya.

Daerah-daerah di Provinsi Kalimantan sendiri sudah sejak lama dikenal sebagai salah satu daerah pusat pertambangan di Indonesia. Berdasarkan kajian di dalam (Haryanto, 2017) jenis-jenis pertambangan yang ada di Kalimantan terdiri dari sumber daya mineral *rare metal* baik bauksit dan monosit di sebagian besar wilayah di Kalimantan Barat, *base metal* berupa seng, tembaga, timah, timbal dan air raksa di sebagian Kalimantan Tengah dan sebagian Kalimantan Timur, *precious metal* berupa emas, perak dan platina di Kalimantan Tengah, *ferro and associates* besi, nikel, kobalt, kromit, mangan dan titan di Kalimantan Selatan. Di sepanjang koridor Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Timur juga ditemukan sumber daya alam batu bara yang hingga kini masih menjadi primadona utama bagi daerah bersama dengan komoditi migas. Berdasarkan data Ditjen Minerba tahun 2014, untuk Kalimantan jumlah ijin usaha pertambangan logam sebanyak 737, ijin usaha non-logam dan batuan sebanyak 434 sementara ijin usaha batu bara mencapai 2,687 buah.

Sayangnya, bagi daerah-daerah yang dikenal memiliki kekayaan sumber daya lama melimpah terkadang justru terkena fenomena kutukan sumber daya alam (*natural resource curse*). Salah satu bentuk dari fenomena tersebut dapat berupa *Dutch Disease* ketika kondisi suatu daerah dengan kekayaan alam yang luar biasa justru mengalami kemunduran perkembangan di beberapa sektor lainnya (Humpreys et al, 2007). Di negara asal munculnya *Dutch Disease* itu sendiri di Belanda, kekayaan utama di sektor pertambangan menekan pertumbuhan sektor manufaktur. Kemunduran sektoral non-migas juga dijumpai di beberapa Negara lainnya dengan format yang sedikit berbeda khususnya untuk level sektoral.

Akibat tidak bekerja secara optimal, maka kekayaan sumber daya alam tersebut akhirnya justru tidak mampu menyejahterakan masyarakat dan hanya dinikmati oleh beberapa kelompok kepentingan sematadan ada gilirannya menimbulkan apa yang disebut penyakit kutukan SDA (*natural resources curse*) (Auty, 1993).

Kalimantan juga menyimpan potensi dukungan yang menjanjikan terhadap pembentukan PDB nasional meskipun hingga kini pembentukan PDB nasional masih didominasi oleh Jawa dan Sumatera. Menurut data BPS hingga tahun 2016, Kalimantan menyumbang PDB nasional sebesar 7,9 % dengan sektor utama pertambangan, industri dan pertanian. Pertumbuhan PDRBnya mencapai 2,0 %, tingkat pengangguran 1,2 % dan tingkat kemiskinan mencapai 6,5 %. Dibandingkan kontribusi terhadap PDB nasional dari Jawa yang mencapai 58,5 % atau Sumatera sebesar 22,0 %, maka kontribusi Kalimantan memang masih jauh dari yang diharapkan. Dilihat dari besaran kontribusi terhadap PDB nasional, Kalimantan hanya lebih baik dibandingkan Sulawesi sebesar 6,0 % dan Papua sebesar 2,5 % (DJPK, 2017).

### 1.1. Permasalahan

Bagaimana penciptaan aspek kemandirian daerah sekaligus prospek ekonomi di Kalimantan sebagai salah satu pulau yang banyak dikaruniai kekayaan sumber daya alam, kemudian menjadi hal yang sangat menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Untuk itulah, penelitian ini kemudian mencoba melihat analisis kemandirian daerah yang diwakili oleh indikator *share* serta prospek perkembangan ekonomi daerah melalui indikator *growth* untuk kasus kabupaten/kota dan provinsi di Kalimantan. Hasil analisis menggunakan *share* dan *growth* ini kemudian dipetakan ke dalam kuadranisasi daerah untuk melihat posisi masing-masing dalam lingkup menyeluruh di wilayah Kalimantan. Dengan melakukan analisis ini, maka ke depannya diharapkan akan dihasilkan sebuah potret awal mengenai posisi masing-masing daerah dengan beberapa atribut utama yang dihasilkan baik aspek kemandirian, prospek ekonomi sekaligus keunggulan dan kelemahannya. Dengan demikian pemerintah pusat nantinya akan dapat lebih memfokuskan berbagai kebijakan yang dihasilkan dengan melihat rekomendasi kajian ini.

## 2. KERANGKA TEORI

### 2.1. Desentralisasi Fiskal di Indonesia

Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah khususnya pada pasal 1 ayat 8 mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di dalam buku yang ditulis oleh Soleh & Rochmansjah Heru (2010), secara umum pelaksanaan desentralisasi di suatu negara, dapat dibedakan menjadi desentralisasi politik, desentralisasi administrasi dan desentralisasi fiskal. Tujuan dari pemberian otonomi melalui pelaksanaan desentralisasi fiskal itu sendiri, oleh Barzelay (1991) diidentifikasi memiliki tiga misi utama yaitu menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan.

Dalam perkembangannya, desentralisasi fiskal kemudian berkembang menjadi inti dari pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri. Bahkan melalui proses desentralisasi fiskal yang bertanggung jawab maka pemerintah daerah akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Pengambilan keputusan pada level pemerintah lokal akan lebih didengarkan untuk menganekaragamkan pilihan lokal dan lebih berguna ke depannya dalam memenuhi kerangka efisiensi alokasi (Oates, 1993). Namun demikian, transformasi ini tentu membutuhkan persyaratan ketika otonomi yang dijalankan harus betul-betul didefinisikan sebagai otonomi yang menempatkan masyarakat sebagai subyek pelaku bukan sekedar pemaknaan dalam pengertian wilayah teritorial tertentu di daerah. Karenanya otonomi daerah bukan sekedar pelimpahan kewenangan semata, melainkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi daerah (Kalloh, 2002).

Meskipun dianggap menjadi praktek terbaik, Remy Prud'homme dalam (Sugiyanto, 2000) tetap mengingatkan adanya beberapa kelemahan terkait pelaksanaan desentralisasi fiskal. Beberapa kelemahan yang kemungkinan menyertai diantaranya:

- a) Menciptakan kesenjangan antara daerah kaya dengan daerah miskin;

- b) Mengancam stabilisasi ekonomi akibat tidak efisiennya kebijakan ekonomi makro;
- c) Mengurangi efisiensi akibat kurang representasinya lembaga perwakilan rakyat dengan indikator masih lemahnya mekanisme *public hearing*;
- d) Perluasan jaringan korupsi dari pusat menuju daerah

### 2.2. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terkait pelaksanaan desentralisasi fiskal juga sudah membahas dengan lokus Kalimantan dilihat dari beberapa fokus pengamatan. Pada tahun 2014 di Jurnal Bina Praja, Pulungan pernah menulis tema kontribusi desentralisasi fiskal melalui pembentukan sistem informasi keuangan daerah (SIMDA) ternyata mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyusunan APBD di Kabupaten Kutai Kertanegara. Selain itu, kebutuhan akan pengelolaan SIMDA memberikan konsekuensi kepada seluruh aparat pemerintah di Kabupaten Kutai Kertanegara harus senantiasa tanggap dan mampu mengelola SIMDA secara mandiri dan menyeluruh. Kebutuhan akan pengelolaan SIMDA juga memiliki konsekuensi dibangunnya berbagai infrastruktur pendukung yang handal. Untuk wilayah Kalimantan Barat, pengaruh desentralisasi terhadap posisi fiskal dan pertumbuhan ekonomi diteliti oleh (Ariza, 2016). Menggunakan metode analisis regresi berganda, kesimpulan yang dihasilkan memberikan gambaran rendahnya kemampuan keuangan kabupaten/kota di Kalimantan Barat tahun 2006-2010. Untuk itu direkomendasikan agar pemerintah daerah lebih mampu menciptakan inovasi di dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang berasal dari PAD.

Dalam dimensi lainnya, penelitian (Ridhanie, 2012) yang mencoba mengaitkan kinerja pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap kualitas pembangunan manusia di era desentralisasi fiskal. Penelitian ini didasarkan kepada pemikiran pentingnya peran daerah di dalam membangun kualitas manusia sebagai kekayaan dan modal dasar pembangunan. Tujuan pembangunan itu sendiri adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyat untuk menikmati hidup sehat, umur panjang dan menjalankan kehidupan yang produktif. Dari hasil analisis Ridhanie, kinerja pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam pembangunan manusia di era desentralisasi fiskal ini masih relatif belum maksimal terlihat dari belum

tuntasnya realisasi kinerja buta aksara pada tahun 2009 yang direncanakan dalam rencana strategis. Sementara kinerja pembangunan manusia di bidang kesehatan juga belum menunjukkan gelagat yang tuntas di era desentralisasi fiskal ini karena masih terhambatnya percepatan Angka Harapan Hidup masyarakat ke level yang diharapkan.

Penelitian lainnya dilakukan oleh (Mailoor, dkk,2016) dengan mengambil sampel daerah Kabupaten Kutai Barat di tahun 2011-2014 untuk menghitung kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Dengan menggunakan metode analisis pertumbuhan pendapatan, rasio keuangan, pertumbuhan belanja, keserasian belanja dan efisiensi belanja dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan BPKAD Kabupaten Kutai Barat terus tumbuh secara positif. Hal yang sama juga diperlihatkan dalam penyelenggaraan desentralisasi meskipun terlihat adanya ketergantungan yang besar terhadap pemerintah provinsi. Namun demikian, dihitung dari aspek efektivitas PAD, maka kinerja BPKAD Kabupaten Kutai Barat menunjukkan efektivitas yang sangat tinggi di dalam mengumpulkan PAD. Begitupula yang diperlihatkan pada analisis keserasian belanja, pertumbuhan belanja dan efisiensi belanja APBD. Keseluruhannya menunjukkan kinerja yang positif dan terus tumbuh secara progresif.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan penggolongan penelitian menurut tujuannya, kajian ini tergolong penelitian eksploratif untuk menemukan masalah-masalah baru demi memperoleh pengertian dan definisi yang lebih baik terkait hubungan antara kemandirian daerah dan prospek ekonomi ke depan dari perilaku variabel penyusun APBD. Selain itu juga ditujukan untuk menguji kemungkinan dilakukannya studi lanjutan yg lebih mendalam sekaligus mengembangkan metode analisis kinerja keuangan daerah yang lebih sederhana namun tepat sasaran (Wirartha, 2006). Penelitian eksploratif ini juga ditujukan untuk mencari terjadinya hubungan sebab akibat dari adanya suatu permasalahan. Dalam kajian ini hubungan sebab akibat yang dicari adalah bagaimana kondisi geografis yang melatarbelakangi suatu daerah kemudian memperngaruhi kinerja APBD melalui indikator kemandirian dan prospek ekonomi daerah ke depannya.

Apabila dilihat dari sisi pendekatan, penelitian ini tergolong jenis penelitian kuantitatif yang memiliki karakteristik berbeda dengan penelitian kualitatif yang mementingkan kedalaman data. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan analisis kepada angka-angka numerikal untuk kemudian diolah dengan menggunakan metode statistik (Suryabrata, 1983). Dalam kajian ini, pendekatan kuantitatif yang digunakan menggunakan data-data *share* yang diwakili oleh data PAD, DBH dan juga data belanja APBD di daerah. Angka numerik juga digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan atau *growth* APBD ke depannya. Dengan demikian data kuantitatif dari kajian ini memang sepenuhnya dihasilkan dari analisis APBD.

#### 3.2. Jenis Data dan Metode Analisis

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis data sekunder karena dikumpulkan dari APBD yang disajikan oleh instansi resmi pemerintah yaitu Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Sementara metode analisis yang digunakan adalah metode *share* untuk menjelaskan kondisi kemandirian APBD di daerah serta metode *growth* untuk melihat aspek pertumbuhan yang juga mencerminkan prospek ekonomi ke depan suatu daerah. Penggunaan metode *share* berfungsi untuk menganalisis kekuatan APBD dari masing-masing APBD di dalam membiayai berbagai kebutuhan belanjanya. Sementara penggunaan metode *growth* akan sangat membantu di dalam memberikan arahan dan sinyal pertumbuhan ekonomi ke depan dari suatu daerah.

Secara rumus matematika, indikator *share* dihitung dengan menggunakan perbandingan atau rasio antara:

$$Share = \frac{(PAD + DBH)}{Total\ Belanja} \times 100\% \dots\dots\dots (1)$$

Di mana:  
 PAD : Pendapatan Asli Daerah  
 DBH : Dana Bagi Hasil (Pajak dan SDA)  
 Total Belanja : Belanja dalam APBD

Sementara itu indikator *growth* dihitung dengan menggunakan rumusan:

$$Growth = \frac{(PAD + DBH)_t - (PAD + DBH)_{t-1}}{(PAD + DBH)_{t-1}} \times 100\%$$

Di mana:

- PAD : Pendapatan Asli Daerah;  
DBH : Dana Bagi Hasil (Pajak dan SDA)  
t : periode saat ini  
t-1 : periode sebelumnya

Metode analisis kuadran akan membagi masing-masing daerah ke dalam 4 kuadran yang sama besar dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Kuadran I: menggambarkan daerah unggulan dengan besaran nilai *share* dan *growth* yang tinggi. Besarnya nilai *share* dimaknai daerah tersebut memiliki kemandirian daerah yang mumpuni sementara *growth* yang positif diartikan daerah tersebut memiliki prospek pertumbuhan ekonomi ke depannya;
- b. Kuadran II: menggambarkan daerah dengan nilai *growth* yang tinggi namun nilai *share* nya justru belum memadai. Besarnya nilai *growth* mengindikasikan bahwa ke depannya kelompok daerah-daerah ini memiliki pengharapan yang bagus akan perbaikan kondisi ekonomi. Sementara rendahnya nilai *share* dapat disebabkan oleh beberapa kasus baik karena beban belanja APBD yang terlalu besar atau lemahnya kemampuan pendapatan di dalam APBD;
- c. Kuadran III: adalah kelompok daerah-daerah dengan angka *share* besar namun *growth* nya rendah. Dengan demikian dapat dilihat bahwa kuadran III ini merupakan kebalikan dari kelompok daerah yang berada di kuadran II. Besarnya angka *share* di daerah yang berada di kuadran III ini lebih disebabkan oleh kontribusi saat ini dari pendapatan di dalam APBD nya masih besar namun ke depannya mulai menunjukkan laju pertumbuhan yang mulai negatif. Jika dikaitkan dengan karakteristik daerah, maka kelompok kuadran III ini dapat merepresentasikan kondisi daerah pertambangan yang sudah memasuki periode senja;
- d. Kuadran IV: merupakan kelompok daerah yang paling tidak memuaskan karena menjadi gambaran daerah terbelakang dengan kemandirian daerah yang rendah dan sangat bergantung kepada pemerintah pusat sekaligus tidak memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang positif ke depannya. Dengan segala karakteristik tersebut dapat dilihat bahwa daerah-daerah di kuadran IV ini wajib menjadi prioritas utama dari segala bentuk kebijakan pembangunan di daerah baik dari

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kebijakan yang dimaksud meliputi perbaikan kebijakan dari aspek perencanaan sekaligus penganggarannya;

### 3.3. Lokus dan Keterbatasan Penelitian

Lokus penelitian kali ini dipilih seluruh daerah kabupaten, kota dan provinsi di wilayah Kalimantan. Dengan demikian data APBD yang dianalisis merupakan data APBD mandiri dari kabupaten/kota dan provinsi masing-masing. Adapun jenis APBD yang dianalisis akan dipilih mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2017 dengan kriteria data realisasi untuk APBD tahun 2010 hingga 2016 sementara data APBD 2017 masih menggunakan data anggaran. Pemilihan tahun 2010 didasari atas pertimbangan tahun awal pelaksanaan desentralisasi fiskal di era reformasi. Secara umum terdapat sekitar lima 55 daerah di Kalimantan yang terdiri dari 10 kota, 5 provinsi dan 40 kabupaten dengan karakteristik masing-masing. Untuk menjelaskan karakteristik masing-masing daerah tersebut nantinya akan diplot di dalam analisis kuadran.

## 4. HASIL PENELITIAN

Dalam tahap awal, akan disampaikan beberapa hasil temuan dan analisis secara parsial untuk menggambarkan kinerja keuangan APBD di seluruh daerah kabupaten, kota dan provinsi se Kalimantan. Analisis tersebut terdiri dari:

### 4.1. Analisis Share

Penggunaan analisis *share* ditujukan untuk menganalisis kemandirian daerah di dalam menjalankan kewajiban pokoknya terkait dengan keseluruhan belanja yang harus dikeluarkan. Hal ini tentu diselaraskan dengan pembagian aspek kewenangan yang dimiliki oleh daerah tersebut baik yang bersifat wajib pelayanan dasar, wajib bukan pelayanan dasar serta pilihan. Berdasarkan hasil penghitungan, pada Tabel 1 dapat dilihat daftar daerah dengan nilai *share* paling tinggi di Kalimantan selama periode 2010-2017. Provinsi Kalimantan Timur tercatat sebagai daerah dengan aspek kemandirian atau nilai *share* terbesar di Kalimantan dari tahun 2010-2017 dengan nilai 96,12. Angka tersebut menjelaskan bahwa kemampuan keuangan APBD Provinsi Kalimantan Timur dalam membiayai seluruh total belanjanya mencapai 96,12% sementara ketergantungan terhadap alokasi bantuan pemerintah pusat melalui skema Transfer ke Daerah (TkD) khususnya komponen Dana Perimbangan hanya sebesar 4%.

Posisi berikutnya yang menempati peringkat kedua daerah dengan nilai *share* atau kemandirian daerahnya relatif besar adalah Kabupaten Kutai Kertanegara dengan nilai *share* sebesar 88,79 kemudian disusul oleh Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 75,69, Kota Bontang dengan *share* 73,10 dan penghuni kelima terbesar adalah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan angka 66,00. Secara keseluruhan, daerah-daerah yang berada pada posisi lima besar *share* tertinggi, memiliki angka yang sangat luar biasa hingga mencapai di atas 50. Dengan demikian beban yang harus ditanggung oleh APBN untuk membantu mendanai kewenangan daerah sebetulnya secara perlahan namun pasti dapat dilepas serta digunakan untuk keperluan lainnya yang lebih memiliki aspek multiplier yang besar.

Menariknya jika melihat komposisi daerah-daerah yang menempati posisi lima besar nilai *share*, mayoritas adalah daerah-daerah yang berada di Provinsi Kalimantan Timur baik level provinsinya serta beberapa kabupaten dan kotanya. Dominasi ini bahkan diperkirakan akan terus terpelihara hingga beberapa periode ke depan seiring dengan melimpahnya kekayaan sumber daya alam yang dimiliki. Dari sisi sektoral, kelima daerah dengan nilai *share* terbesar memang secara rata-rata masih mengandalkan sektor pertambangan dan komoditas alam. Kekuatan terbesar daerah-daerah ini terletak pada penerimaan DBH SDA khususnya migas yang mendominasi penerimaan APBD setiap tahunnya. Khusus di daerah provinsi baik di Kalimantan Timur maupun Kalimantan Selatan, kekuatannya makin berlipat dengan besarnya %tase penerimaan PAD khususnya yang berasal dari pengenaan pajak-pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.

**Tabel 1. Daerah Dengan Nilai Share Tertinggi di Kalimantan Tahun 2010-2017 (%)**

No	Nama Daerah	Nilai Share
1	Prov Kalimantan Timur	96,12
2	Kabupaten Kutai Kertanegara	88,79
3	Prov Kalimantan Selatan	75,69
4	Kota Bontang	73,10
5	Kabupaten Penajam Paser Utara	66,00

Sumber: DJPK, Kemenkeu, Data diolah.

Jika pada Tabel 1 menggambarkan daerah-daerah dengan nilai *share* tertinggi di Kalimantan, maka pada Tabel 2 justru

memperlihatkan daerah-daerah dengan nilai *share* terendah di Kalimantan periode tahun 2010-2017. Di dalam pengelompokan daerah dengan nilai *share* terendah ini juga terjadi dominasi oleh Provinsi Kalimantan Barat. Dengan demikian Provinsi Kalimantan Timur mendominasi kelompok daerah dengan nilai *share* tertinggi di Kalimantan periode 2010-2017, sementara Provinsi Kalimantan Barat mendominasi kelompok daerah dengan nilai *share* terendah di Kalimantan periode 2010-2017. Cukup menarik jika komparasi antar kedua daerah provinsi ini dianalisis lebih mendalam pada penelitian berikutnya. Sekiranya faktor mendasar apa yang menyebabkan munculnya fenomena tersebut apakah memang hanya disebabkan oleh faktor kinerja sektoral semata atau juga dipengaruhi oleh beberapa kondisi sosial, geografis dan demografi lainnya.

Kabupaten Bengkayang tercatat sebagai daerah dengan nilai *share* terendah di Kalimantan, sebesar 8,25. Artinya faktor kemandirian daerah di Kabupaten Bengkayang hanya sekitar 8,25 %, sementara 82% lainnya masih bergantung kepada alokasi bantuan pemerintah pusat. Daerah berikutnya adalah Kabupaten Kapuas Hulu dengan nilai *share* 8,78 disusul oleh Kabupaten Mempawah juga sama nilai *share* 8,78. Kabupaten Kayong Utara tercatat sebagai peringkat keempat daerah dengan nilai *share* terendah sebesar 8,98 serta kabupaten Sambas dengan nilai 9,13. Yang cukup memprihatinkan adalah keseluruhan daerah dengan kategori nilai *share* terendah ini secara rata-rata berada di bawah kisaran kemandirian 10%. Artinya besaran ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat mencapai lebih dari 85% atau nyaris tidak ada faktor penerimaan di dalam APBD yang mampu menjadi pendukung berkembangnya daerah-daerah tersebut.

Secara umum, daerah-daerah di dalam kategori *share* terendah ini memang memiliki persentase PAD dan juga DBH yang sangat jauh dari harapan. Namun demikian, hipotesis lainnya yang muncul adalah tingginya beban belanja APBD. Tingginya beban belanja APBD tidak terlalu mengkhawatirkan apabila struktur belanjanya memang dialokasikan untuk belanja bersifat modal serta menimbulkan efek pertumbuhan investasi. Yang menjadi permasalahan adalah jika struktur belanja tersebut justru hanya didominasi oleh belanja-belanja aparatur rutin kepegawaian yang tetap memiliki dampak pertumbuhan dari sisi konsumsi, namun tidak berkelanjutan. Dengan



demikian, strategi pengembangan daerah yang perlu digelorakan selain upaya memperluas basis baru penerapan PAD juga perlu memikirkan kampanye untuk menciptakan struktur kepegawaian yang lebih rasional di samping upaya mendorong belanja-belanja modal dan investasi kapital.

Rendahnya kemampuan keuangan APBD daerah-daerah pada Tabel 2 ini sekiranya perlu menjadi perhatian secara seksama karena pola yang sama juga terjadi di banyak daerah lainnya di Indonesia. Fenomena ini sekaligus menandai perlunya evaluasi secara menyeluruh terkait dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia karena salah satu filosofi mendasar dari pelaksanaan desentralisasi seutuhnya adalah meningkatkan kemandirian daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangan pelayanan umum, pertumbuhan ekonomi serta pembangunan daerah. Makin bergantungnya daerah terhadap bantuan pemerintah pusat tentu menimbulkan pertanyaan terkait kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan segala tugas dan kewenangan tersebut ke depannya.

Menariknya jika dicermati secara mendalam, keseluruhan daerah yang masuk dalam kategori nilai *share* rendah adalah daerah kabupaten. Tidak ada satupun kota atau provinsi yang masuk ke dalam kategori ini. Dengan demikian, sinyalemen bahwa kabupaten memiliki tantangan pembangunan yang lebih berat dibandingkan kota sekiranya memang benar dan tidak terbantahkan. Luasnya wilayah sebuah kabupaten dibandingkan luas wilayah kota mungkin dapat menjadi penyebab awal terjadinya hal ini. Apalagi jika merujuk kepada regulasi pembentukan kabupaten baru yang minimal harus terdiri dari lima kecamatan dibandingkan pembentukan kota baru yang hanya minimal empat kecamatan. Selain itu, modernisasi sektor-sektor di kota sekiranya juga membawa implikasi yang signifikan di dalam pembentukan kinerja keuangan APBD masing-masing. Kota biasanya identik dengan sektor-sektor yang modern dan terbangun, sementara kabupaten lebih identik dengan label sektor tradisional dan tidak memiliki nilai tambah yang besar terhadap penerimaan PADnya.

Tantangan ke depannya tentu bagaimana mengubah wajah kabupaten menjadi lebih modern dan identik dengan pembaruan yang membawa nilai tambah besar. Di sinilah pentingnya peran dari peningkatan kapasitas dan kualitas belanja APBD kabupaten sebagai *trigger* awal dari masuknya berbagai investasi

swasta dalam menggelorakan modernisasi kabupaten dengan tetap menjaga nilai-nilai keasliannya. Ketika belanja APBD kabupaten mampu mewujudkan kebutuhan infrastruktur dasar, investasi swasta lanjutan akan datang dengan sendirinya.

**Tabel 2. Daerah Dengan Nilai *Share* Terendah di Kalimantan Tahun 2010-2017 (%)**

No	Nama Daerah	Nilai <i>Share</i>
1	Kabupaten Bengkayang	8,25
2	Kabupaten Kapuas Hulu	8,78
3	Kabupaten Mempawah	8,78
4	Kabupaten Kayong Utara	8,98
5	Kabupaten Sambas	9,13

Sumber: DJPK, Kemenkeu, Data diolah

#### 4.2. Analisis *Growth*

Analisis parsial di daerah berikutnya adalah analisis *growth* atau sebuah analisis yang dilakukan untuk melihat bagaimana prospek pertumbuhan ekonomi di daerah ke depannya. Sebuah daerah dapat memiliki *growth* positif atau negatif tergantung dari kondisi APBD masing-masing. Daerah yang memiliki *growth* positif artinya daerah tersebut ke depannya masih memiliki harapan untuk terus menjaga momentum pertumbuhan APBDnya yang diselaraskan melalui pertumbuhan sektoral di daerah. Sebaliknya sebuah daerah dengan angka *growth* yang negative mengandung makna daerah tersebut sudah berada pada periode senja dari sebuah pola pertumbuhan APBD dan wajib untuk sesegera mungkin mengubah pola pembangunan daerahnya menuju arah konvergensi seperti semula.

Terkait dengan analisis *growth* ini, menimbang sebagian besar daerah di Kalimantan adalah daerah dengan sektor kunci pertambangan, maka perlu dipikirkan juga permasalahan bekerjanya *natural curse* atau yang sering dikenal sebagai *Dutch Diseases*. Di dalam Haryanto (2017) kedua fenomena tersebut pada gilirannya mewajibkan adanya sebuah gerakan hijrah sektoral (*sectoral migration*) khususnya untuk daerah-daerah kaya migas yang saat ini sudah mengalami periode *declining* pada proses produksi pertambangan migasnya. Dengan hijrah sektoral ini maka daerah-daerah kaya migas diharapkan menemukan secepat mungkin sector unggulan baru non-migas sekaligus menggunakan

kekayaan dana migas yang masih tersisa untuk mengembangkan sektor pengganti tersebut.

Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat kelompok daerah-daerah dengan nilai *growth* tertinggi di Kalimantan. Tercatat Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan memiliki nilai *growth* tertinggi di Kalimantan periode 2010-2017 sebesar 30,69%. Berdasarkan statistik Bank Indonesia, sektor unggulan di Kabupaten Balangan adalah sektor pertanian sub sektor tanaman pangan dan komoditi padi sawah. Beberapa sektor unggulan lainnya adalah sektor kehutanan dengan komoditi utama gaharu dan karet. Pada kurun waktu terkini, Kabupaten Balangan juga aktif mengembangkan sektor pariwisata sub sektor pariwisata alam dengan menggunakan pendekatan *community development* sebagai penggerak utamanya.

Daerah berikutnya yang memiliki nilai *growth* tertinggi adalah Kabupaten Barito Timur dengan nilai 8,11%, disusul Kota Singkawang dengan besaran 7,22%, Kota Pontianak sebesar 7,01% dan Kabupaten Kubu Raya dengan nilai 6,59%. Seperti halnya dengan Kabupaten Balangan, hampir keseluruhan daerah-daerah yang berada di kelompok *growth* tinggi ini tidak ada yang menggantungkan penerimaan APBDnya dari sektor pertambangan. Dilihat dari persebaran geografis, menarik jika daerah-daerah dengan nilai *growth* tertinggi justru didominasi oleh daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Barat yaitu Kabupaten Balangan, Kota Singkawang, Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Hanya Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah yang mampu masuk dan tercatat sebagai daerah non-Kalimantan Barat.

**Tabel 3. Daerah Dengan Nilai *Growth* Tertinggi di Kalimantan Tahun 2010-2017 (%)**

No	Nama Daerah	Nilai Growth
1	Kabupaten Balangan	30,69
2	Kabupaten Barito Timur	8,11
3	Kota Singkawang	7,22
4	Kota Pontianak	7,01
5	Kabupaten Kubu Raya	6,59

Sumber: DJPK, Kemenkeu, data diolah

Klasifikasi yang berbeda antara daerah dengan *share* terkecil dan *growth* tertinggi untuk daerah-daerah yang sama di wilayah

Provinsi Kalimantan Barat tentu menarik untuk dianalisis lebih mendalam. Khusus bagi pemerintah provinsi, temuan ini sekaligus memberikan sinyal bahwa kebijakan yang diambil bagi pengembangan ekonomi secara menyeluruh untuk kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat, tidak dapat disusun secara sembarangan dan harus bersifat spesifik dengan memperhatikan aspek lokalitas daerah. Harus dapat dibedakan mana daerah yang sudah maju dan siap untuk dikembangkan dengan kebijakan yang lebih memprioritaskan peran swasta serta mana daerah yang belum siap dan masih terbelakang dengan kebijakan yang masih didominasi oleh peran pemerintah.

Dikaitkan dengan Tabel 1, dapat dilihat bahwa daerah-daerah dengan *share* tertinggi yang rata-rata memiliki kekayaan SDA besar khususnya migas, terbukti tidak ada unsur yang masuk dalam kategori *growth* tertinggi. Kondisi ini sepertinya mengkonfirmasi hipotesis terkait perlunya hijrah sektoral yang sudah dijelaskan sebelumnya. Daerah-daerah migas di Tabel 1 sepertinya betul-betul sedang menghadapi periode *declining* sumber daya alam dan sesegera mungkin wajib menemukan sektor baru non-migas untuk dijadikan sektor unggulan. Karakteristik sektor unggulan baru tersebut harus mampu memberikan umpan balik yang besar baik ke depan maupun ke belakang.

Apabila Tabel 3 menggambarkan daerah-daerah dengan *growth* tertinggi, maka Tabel 4 menggambarkan kelompok daerah-daerah dengan nilai *growth* terendah di Kalimantan periode 2010-2017. Sangat berbeda dengan pengelompokan sebelumnya yang banyak menghasilkan ketegori yang menggerombol di suatu wilayah tertentu di sebuah provinsi, maka persebaran daerah berdasarkan Tabel 4 justru sangat terlihat. Daerah dengan *growth* terendah adalah Kabupaten Tanah Laut di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar minus 12,37%. Kemudian Kabupaten Kapuas Hulu di Provinsi Kalimantan Barat sebesar minus 8,89%, Kabupaten Katingan di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar minus 7,73%, Kabupaten Penajem Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur sebesar minus 7,15 dan Kabupaten Melawi di Provinsi Kalimantan Barat sebesar minus 7%.

Meratanya pembagian daerah dengan nilai *growth* terendah menggambarkan adanya permasalahan bersama yang harus diatasi oleh pemerintah daerah. Kondisi ini juga mengindikasikan perlunya koordinasi secara menyeluruh antara masing-masing kabupaten

dan kota dengan provinsi dalam mengatasi permasalahan rendahnya pertumbuhan. Melihat karakteristik seluruh kabupaten yang mengisi kategori ini, semakin menguatkan perlunya modernisasi kabupaten dalam mengejar aspek pertumbuhan ekonomi ke depan yang berkelanjutan. Jika tidak maka kabupaten akan selalu melekat dengan stigma tidak mandiri dan tidak memiliki prospek pertumbuhan ekonomi ke depan yang optimal.

**Tabel 4. Daerah Dengan Nilai *Growth* Terendah di Kalimantan Tahun 2010-2017 (%)**

No	Nama Daerah	Nilai Share
1	Kabupaten Tanah Laut	(12,37)
2	Kabupaten Kapuas Hulu	(8,89)
3	Kabupaten Katingan	(7,73)
4	Kabupaten Penajem PU	(7,15)
5	Kabupaten Melawi	(7,00)

Sumber: DJPK, Kemenkeu, Data diolah

#### 4.3. Analisis Metode Kuadran

Setelah melakukan analisis parsial dengan menggunakan pendekatan *share* sebagai *proxy* dari aspek kemandirian di daerah serta *growth* sebagai gambaran atas prospek pertumbuhan ekonomi ke depannya di daerah, maka seluruh daerah akan dianalisis ulang menggunakan metode kuadran. Penggunaan metode kuadran ini nantinya akan menghitung dan membagi keseluruhan daerah baik kabupaten, kota dan provinsi ke dalam empat kuadranisasi daerah dengan karakteristik masing-masing sesuai kuadrannya. Hasil analisis menggunakan metode kuadran untuk keseluruhan daerah di Kalimantan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. **Kuadran I:** dari hasil analisis terdapat tujuh daerah yang berada pada kuadran I, dengan perincian daerah sebagai berikut: Kabupaten Kota Baru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kota Balikpapan dan Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, masuknya ketujuh daerah ke dalam kuadran I ini menandakan bahwa ketujuh daerah ini memiliki status daerah unggulan yang siap dan sangat layak untuk menjadi daerah tujuan investasi. Kesiapan dan kelayakannya dapat diukur dari aspek kemandirian APBD yang besar dan prospek ekonomi ke depannya relatif baik. Status di

kuadran I selain disebabkan karena kemampuan APBD nya besar juga pengelolaan belanjanya relatif rasional. Berbagai kondisi positif ini wajib terus dipertahankan dan dikembangkan ke depannya demi menciptakan daerah-daerah yang mandiri dan mengurangi beban ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Keberhasilan ketujuh daerah ini tentu wajib direplikasi ke daerah-daerah lainnya dengan tetap memperhatikan aspek lokalitas dan karakteristik masing-masing daerah. Kelompok daerah yang berada di kuadran I ini juga terdistribusikan dengan merata untuk semua kategori daerah ada perwakilan dari kabupaten sebanyak lima daerah, satu daerah dari kota dan satu daerah perwakilan provinsi. Dominasi kabupaten di kuadran I ini juga memberikan jawaban atas permasalahan lambannya pertumbuhan ekonomi dan kemandirian di kabupaten. Akar masalah mengapa banyak kabupaten berada di level kemandirian yang rendah serta prospek ekonomi yang tidak baik ternyata terkait dengan beban belanja APBD yang besar. Ketika status perekonomian dan APBD tidak terlalu cemerlang, beban belanja APBD yang berlebihan memang menimbulkan dampak negatif ;

b. **Kuadran II:** sekitar enam belas daerah berada di kuadran II ini yang menggambarkan status daerah dengan kemandirian APBD rendah namun prospek ekonomi ke depannya bagus. Beberapa daerah yang berada di kuadran II ini di antaranya Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Kubu Raya, Kota Singkawang, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Sambas, Kabupaten Mempawah dan Gunung Mas. Melihat daftar kelompok daerah yang berada di kuadran II ini akan menarik jika dikaitkan dengan daftar daerah berdasarkan analisis *share* karena semua daerah yang berada di kelompok *share* terendah masuk ke dalam kategori kuadran II. Strategi yang perlu ditempuh untuk mengentaskan daerah-daerah di kuadran II ini yang paling utama adalah menciptakan beban belanja APBD yang rasional karena prospek ekonomi ke depannya masih positif. Prospek ekonomi ke depan yang masih positif ini wajib dipelihara dan dikembangkan ke depannya untuk menjadi daya dorong utama bagi pengembangan ekonomi daerah ke depannya. Pemerintah daerah harus mampu menciptakan iklim



masyarakat demi mengembangkan seluruh potensi daerah secara optimal. Pencapaian tujuan desentralisasi fiskal tersebut pada gilirannya akan membawa dampak positif terhadap pemerintah pusat.

Indonesia sendiri sudah mengenal proses desentralisasi fiskal sejak periode Orde Lama, Orde Baru hingga Reformasi. Desentralisasi fiskal di era reformasi secara resmi dimulai sejak 1 Januari 2011 dengan perubahan mendasar pada titik tolak pelaksanaan desentralisasi fiskal di level kabupaten/kota. Penyerahan titik tolak pelaksanaan desentralisasi fiskal kepada kabupaten/kota didasarkan kepada pertimbangan upaya untuk memotong rantai birokrasi selain pemerintah kabupaten/kota dianggap menjadi pihak yang paling mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya. Dalam pelaksanaannya, dikenal adanya filosofi *money follow function* sebagai prinsip utama yang harus diperhatikan dan dilaksanakan. Prinsip tersebut mengandung makna bahwa segala bentuk penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, seyogyanya harus disertai dengan penyerahan sumber-sumber pendanaannya. Pada level implementasi, prinsip *money follow function* tersebut kemudian diselaraskan ke dalam bentuk kerangka kebijakan melalui UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah melalui mekanisme Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Di dalam Transfer ke Daerah, terdiri dari komponen Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Otonomi Khusus bagi pemerintah NAD, Papua, Papua Barat dan Keistimewaan Provinsi DIY. Dilihat dari peruntukannya, pengalokasian DBH dan DAU termasuk dalam kategori *block grant* yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antar daerah (*horizontal imbalances*) sedangkan DAK lebih bersifat *specific allocation grant* yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam perjalanannya, pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia memberikan dampak yang multi tafsir. Beberapa peneliti merasa yakin bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia khususnya sejak periode Orde Reformasi, justru semakin jauh dari tujuan awal, beberapa justru menemukan fakta yang mampu menjawab sinyal negatif yang dipremiskan oleh penelitian sebelumnya.

Daerah-daerah di Provinsi Kalimantan sendiri sudah sejak lama dikenal sebagai salah satu daerah pusat pertambangan di Indonesia. Beberapa jenis tambang yang dimiliki Kalimantan diantaranya sumber daya mineral *rare metal* baik bauksit dan monosit di sebagian besar wilayah di Kalimantan Barat, *base metal* berupa seng, tembaga, timah, timbal dan air raksa di sebagian Kalimantan Tengah dan sebagian Kalimantan Timur, *precious metal* berupa emas, perak dan platina di Kalimantan Tengah, *ferro and associates* besi, nikel, kobalt, kromit, mangan dan titan di Kalimantan Selatan. Di sepanjang koridor Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Timur juga ditemukan sumber daya alam batu bara yang hingga kini masih menjadi primadona utama bagi daerah bersama dengan komoditi migas. Berdasarkan data Ditjen Minerba tahun 2014, untuk Kalimantan jumlah ijin usaha pertambangan logam sebanyak 737, ijin usaha non-logam dan batuan sebanyak 434 sementara ijin usaha batu bara mencapai 2,687 buah.

Sayangnya, bagi daerah-daerah yang dikenal memiliki kekayaan sumber daya lama melimpah terkadang justru terkena fenomena kutukan sumber daya alam (*natural resource curse*). Salah satu bentuk dari fenomena tersebut dapat berupa *Dutch Disease* ketika kondisi suatu daerah dengan kekayaan alam yang luar biasa justru mengalami kemunduran perkembangan di beberapa sektor lainnya. Akibat tidak bekerja secara optimal, maka kekayaan sumber daya alam tersebut akhirnya justru tidak mampu menyejahterakan masyarakat dan hanya dinikmati oleh beberapa kelompok kepentingan sematadan ada gilirannya menimbulkan apa yang disebut penyakit kutukan SDA (*natural resources curse*). Kalimantan juga menyimpan potensi dukungan yang menjanjikan terhadap pembentukan PDB nasional meski belum maksimal.

Bagaimana penciptaan aspek kemandirian daerah sekaligus prospek ekonomi di Kalimantan sebagai salah satu pulau yang banyak dikaruniai kekayaan sumber daya alam, kemudian menjadi hal yang sangat menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Untuk itulah, penelitian ini mencoba melihat analisis kemandirian daerah yang diwakili oleh indikator *share* serta *growth*. Berdasarkan hasil penghitungan, daerah dengan nilai *share* paling tinggi di Kalimantan selama periode 2010-2017 adalah Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai 96,12. Angka tersebut menjelaskan bahwa kemampuan keuangan APBD Provinsi Kalimantan Timur dalam membiayai seluruh total belanjanya mencapai 96,12% sementara

ketergantungan terhadap alokasi bantuan pemerintah pusat melalui skema Transfer ke Daerah (TkD) khususnya komponen Dana Perimbangan hanya sebesar 4%.

Posisi berikutnya adalah Kabupaten Kutai Kertanegara dengan nilai *share* sebesar 88,79 kemudian disusul oleh Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 75,69, Kota Bontang dengan *share* 73,10 dan penghuni kelima terbesar adalah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan angka 66,00. Secara keseluruhan, daerah-daerah yang berada pada posisi lima besar *share* tertinggi, memiliki angka yang sangat luar biasa hingga mencapai di atas 50. Dengan demikian beban yang harus ditanggung oleh APBN untuk membantu mendanai kewenangan daerah sebetulnya secara perlahan namun pasti dapat dilepas serta digunakan untuk keperluan lainnya yang lebih memiliki aspek multiplier yang besar.

Menariknya jika melihat komposisi daerah-daerah yang menempati posisi lima besar nilai *share*, mayoritas adalah daerah-daerah yang berada di Provinsi Kalimantan Timur baik level provinsinya serta beberapa kabupaten dan kotanya. Dominasi ini bahkan diperkirakan akan terus terpelihara hingga beberapa periode ke depan seiring dengan melimpahnya kekayaan sumber daya alam yang dimiliki. Dari sisi sektoral, kelima daerah dengan nilai *share* terbesar memang secara rata-rata masih mengandalkan sektor pertambangan dan komoditas alam. Kekuatan terbesar daerah-daerah ini terletak pada penerimaan DBH SDA khususnya migas yang mendominasi penerimaan APBD setiap tahunnya. Khusus di daerah provinsi baik di Kalimantan Timur maupun Kalimantan Selatan, kekuatannya makin berlipat dengan besarnya %tase penerimaan PAD khususnya yang berasal dari pengenaan pajak-pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.

Menggunakan analisis *growth* kelompok daerah-daerah dengan nilai *growth* tertinggi di Kalimantan adalah Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai *growth* sebesar 30,69%. Berdasarkan statistik Bank Indonesia, sektor unggulan di Kabupaten Balangan adalah sektor pertanian sub sektor tanaman pangan dan komoditi padi sawah. Beberapa sektor unggulan lainnya adalah sektor kehutanan dengan komoditi utama gaharu dan karet. Pada kurun waktu terkini, Kabupaten Balangan juga aktif mengembangkan sektor pariwisata sub sektor pariwisata alam dengan menggunakan pendekatan *community development* sebagai penggerak utamanya.

Daerah berikutnya yang memiliki nilai *growth* tertinggi adalah Kabupaten Barito Timur dengan nilai 8,11%, disusul Kota Singkawang dengan besaran 7,22%, Kota Pontianak sebesar 7,01% dan Kabupaten Kubu Raya dengan nilai 6,59%. Seperti halnya dengan Kabupaten Balangan, hampir keseluruhan daerah-daerah yang berada di kelompok *growth* tinggi ini tidak ada yang menggantungkan penerimaan APBDnya dari sektor pertambangan. Dilihat dari persebaran geografis, menarik jika daerah-daerah dengan nilai *growth* tertinggi justru didominasi oleh daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Barat yaitu Kabupaten Balangan, Kota Singkawang, Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Hanya Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah yang mampu masuk dan tercatat sebagai daerah non-Kalimantan Barat.

Hasil analisis menggunakan metode kuadran untuk keseluruhan daerah di Kalimantan kemudian membagi daerah menjadi kuadran I yang terdiri dari tujuh daerah yaitu Kabupaten Kota Baru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kota Balikpapan dan Provinsi Kalimantan Selatan. Ketujuh daerah di kuadran I ini menandakan bahwa ketujuh daerah ini memiliki status daerah unggulan yang siap dan sangat layak untuk menjadi daerah tujuan investasi. Kesiapan dan kelayakannya dapat diukur dari aspek kemandirian APBD yang besar dan prospek ekonomi ke depannya relatif baik. Status di kuadran I selain disebabkan karena kemampuan APBD nya besar juga pengelolaan belanjanya relatif rasional.

Berikutnya masuk ke dalam kuadran II sekitar enam belas daerah dengan status kemandirian APBD rendah namun prospek ekonomi ke depannya bagus. Beberapa daerah yang berada di kuadran II ini diantaranya Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Kubu Raya, Kota Singkawang, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Sambas, Kabupaten Mempawah dan Gunung Mas. Strategi yang perlu ditempuh untuk mengentaskan daerah-daerah di kuadran II ini yang paling utama adalah menciptakan beban belanja APBD yang rasional karena prospek ekonomi ke depannya masih positif. Prospek ekonomi ke depan yang masih positif ini wajib dipelihara dan dikembangkan ke depannya untuk menjadi daya dorong utama bagi pengembangan ekonomi daerah ke depannya. Pemerintah daerah harus mampu menciptakan iklim investasi yang positif sehingga investor swasta akan datang dan menanamkan modalnya dalam memacu percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Tiga belas daerah berada di kuadran III yang menggambarkan kondisi daerah dengan kemandirian APBD tinggi namun prospek ekonomi ke depannya justru negatif atau mulai turun. Jika di kuadran II diisi oleh sebagian besar daerah dengan *share* terendah, maka kuadran III diisi oleh daerah dengan rata-rata *share* tinggi. Namun demikian, karena kemampuan *share* tinggi tersebut mayoritas disupport oleh sektor pertambangan, maka daerah-daerah tersebut terbukti mulai menghadapi perlambatan prospek pertumbuhan ekonomi ke depannya. Apabila di kuadran II strategi yang harus diambil oleh daerah adalah rasionalisasi beban belanja APBD, maka di kuadran III strategi yang wajib diambil adalah hijrah sektoral secepatnya dengan menggunakan dana berlimpah dari hasil sektoral migas yang saat ini masih tersisa. Dengan hijrah sektoral maka daerah diharapkan mampu mengembalikan jalur pertumbuhan positifnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan ke depannya.

Yang paling memprihatinkan adalah kelompok daerah di kuadran IV dengan kondisi tidak memiliki kapasitas kemampuan keuangan APBD yang memadai di satu sisi, di sisi lainnya daerah tersebut juga tidak memiliki prospek ekonomi ke depannya secara memuaskan. Bagi pemerintah sendiri, daerah-daerah yang berada di kuadran IV ini dapat dijadikan rekomendasi utama pengambilan sekaligus implementasi kebijakan percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah. Melihat karakteristik daerah yang berada di kuadran IV ini sebagian besar merupakan daerah lama yang sudah ada dan menjalankan segala kewenangannya. Pemerintah pusat dan provinsi juga dapat melihat daerah-daerah di kuadran IV ini sebagai sasaran utama berbagai kebijakan yang dihasilkan sehingga ke depannya daerah-daerah tersebut dapat dipindahkan menuju kuadran yang lebih bagus lagi.

## 6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Hasil kajian ini memiliki dampak implikasi kebijakan yang sangat kuat khususnya jika dikaitkan dengan beberapa isu utama pembangunan. Implikasi yang utama tentu sebagai salah satu bahan evaluasi terkait pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia. Beberapa hasil temuan mengenai indikator kemandirian daerah dan prospek ekonomi ke depan jelas menjadi input terbaik sebagai upaya perbaikan kebijakan desentralisasi fiskal di level nasional. Implikasi kebijakan lainnya juga terkait dengan permasalahan daerah kaya

sumber daya alam namun tidak memberikan kontribusi kekayaannya terhadap kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Bagaimana situasi daerah yang wajib melakukan hijrah sektoral juga menjadi implikasi kebijakan lainnya.

Beberapa kelemahan masih menjadi keterbatasan dari penelitian ini. Keterbatasan pertama terkait dengan substansi yang dianalisis. Hampir semua analisis mendasarkan kepada kinerja keuangan APBD semata tidak mendiskusikan isu lainnya seperti kualitas belanja APBD maupun kelemahan regulasi. Keterbatasan data juga menjadi kendala dimana data yang dimiliki dari 2010-2016 memang sudah bersifat realisasi. Sayangnya data 2017 masih bersifat anggaran sehingga dikhawatirkan akan sedikit menimbulkan dampak bias di dalam analisisnya. Pembaruan data anggaran tahun 2018 sepertinya akan menjadi hal yang menarik untuk dilakukan dalam penelitian selanjutnya selain upaya memperluas cakrawala pembahasan baik dari aspek non-APBD maupun beberapa isu tematik dalam pembangunan lainnya misalnya dampak terhadap pengentasan kemiskinan, gender dan inklusivitas.

## PENGHARGAAN (ACKNOWLEDGEMENT)

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah berkontribusi di dalam penulisan kajian ini khususnya rekan-rekan di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Direktorat Dana Perimbangan yang telah sudi membagi data-data yang sangat substansial. Ke depannya penulis masih sangat berharap untuk terus didukung dengan *support* data yang valid demi menghasilkan karya-karya lain ke depannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Auty, Richard.1993.*Sustaining Development in Mineral Economies: The Recourse Curse*. England. Routledge;
- Adi, Priyo Hari & Puspa Dewi Ekaristi. (2009). Fenomena Ilusi Fiskal Dalam Kinerja Anggaran Pemerintah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 6. No. 1; pp1-19;
- Agustina, Oesi, A. (2013). *Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011)*. Skripsi. Jurusan Ilmu Ekonomi. FEB Unbraw;

- Ariza, Anggatia.(2016). Pengaruh Kemampuan Keuangan dan Posisi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*. Vol. 5. No. 1: pp24-45;
- Barzelay, M. (1991). Managing Local Development, Lesson from Spain. *Policy Science*. Vol.24. No.1;pp:271-290;
- Bahl, R.W. (2000). *China: Evaluating The Impact of Intergovernmental Fiscal Reform dalam Fiscal Decentralization in Developing Countries*. Edited by Richard M Bird and Francois Vaillancourt. Cambridge University Press, London. UK;
- Bawono, Bernando Gatot Tri. (2008). *Pengaruh DAU dan PAD Terhadap Belanja Pemerintah Daerah*. Skripsi.IESP. FE UII;
- BPS. (2016). Laporan Ekonomi Indonesia. Jakarta;
- Doriza, Shinta, dkk. (2012). Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Disparitas Akses Pendidikan Dasar di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*. Vol. 13. No. 1: pp31-46;
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2017). Kebijakan Dana Perimbangan Tahun 2017. Bahan Pidato Menteri Keuangan Dalam Sosialisasi Dana Perimbangan. Jakarta;
- Humpreys, Macratan. et al. (2007). *Escaping The Resources Curse*. Colombia University Press. New York, USA;
- Handayani, Atiah. (2009). *Analisis Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Pengeluaran Daerah dan Upaya Pajak (Tax Effort) Daerah (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)*. Skripsi. IESP, UNDIP;
- Hruza, Filip. (2015). Public Sector Organization Financial Ratios Recent Development As A Matter Of Financial Innovation. Investment Management and Financial Innovations. Vol. 12, Issue 2;
- Haryanto, Joko Tri. (2017). Comparative Analysis of Financial Performance in Fiscal Decentralization Era Among Natural and Non-Natural Resources Region. *Jurnal Bina Praja*. Vol. 9. No.2;pp:171-184;
- Kaloh, J. (2002). *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Penerbit PT. Rineka Cipta. Jakarta. Indonesia;
- Khusaini, Muhammad. (2006). *Ekonomi Publik. Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. BPFE, Unbraw. Malang. Indonesia;
- Kurnia, Ahmad Syakir. (2006). Model Pengukuran Kinerja dan Efisiensi Sektor Publik. Metode Free Disposable Hull (FDH). *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 11. No. 2: pp1-20;
- Kharisma, Bayu. (2013). Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebelum dan Sesudah Era Desentralisasi Fiskal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Vol.14. No. 2;pp101-119;
- Litvack, J. & Jessica Seddon, (1999). Decentralization Briefing Notes. The World Bank. Washington DC;
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. BPFE. UGM. Yogyakarta;
- Mailoor, Nanda Ertina. dkk. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur (Studi Kasus Pada BPKAD Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur Tahun 2011-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol.16. No. 3: pp624-634;
- Oates, Wallace E. (1972). Fiscal Federalism. New York. Harcourt Brace Jovanovic;
- ..... (1993). Fiscal Decentralization and Economic Development. *National Tax Journal*. XLVI;pp:237-243;
- ..... (2011). Fiscal Federalism. Paperback Edition. Edward Elgar Publishing Limited. UK;



- Pulungan, M. Soleh.(2014).Optimalisasi Simda Dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur Yang Lebih Berkualitas. *Jurnal Bina Praja*. Vol. 6. No. 4: pp269-282;
- Rondinelli, D. (1989). Decentralizing Public Services in Developing Countries: Issues and Opportunities. *Journal of Social Political and Economic Studies* .Vol. 14. No. 1;
- Ridhanie, Azhar. (2012). Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*. Vol. 1. Edisi. 2: pp73-91;
- Sugiyanto. (2000). Kemandirian dan Otonomi Daerah. *Media Ekonomi dan Bisnis*. Vol.XII. No.1;pp:1-7;
- Sumarsono. (2009). Analisis Kemandirian Otonomi Daerah: Kasus Kota Malang (1999-2004). *JESP*. Vol. 1. No.1;pp:13-26;
- Sasana, Hadi. (2009). Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Antar Daerah dan Tenaga Kerja Terserap Terhadap Kesejahteraan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Dalam era Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JEB)*. Vol.16. No.1;pp:50-69;
- Soleh, C & Rochmansjah Heru. (2010).*Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Fokus Media. Bandung. Indonesia;
- Sasana, Hadi. (2011). Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dalam Era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JEB)*. Vol. 18. No.1;pp:46-58;
- Sularso, H & Restianto, Y.E. (2011). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Aloaksi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Jurnal Media Riset Akuntansi*. Vol. 1. No. 2: pp109-124;
- Suryabrata, Sumadi.(2013).*Metodologi Penelitian*. Penerbit Raja Grafindo. Jakarta. Indonesia;
- Simanjuntak, Kasdin. (2015). Implementasi Kebijakan Fiskal di Indonesia.*Jurnal Bina Praja*. Vol. 7. No. 2; pp111-130;
- Tjahjono, Achmad & Rina Oktavianti. (2016).Pengaruh Rasio Efektivitas PAD, DAU dan DAK Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi DIY.*Jurnal Kajian Bisnis*. Vol.24. No.1:pp25-34;
- Wasistiono, Sadu. (2010). Menuju Desentralisasi Berkesinambungan.*Jurnal Ilmu Politik*. Edisi. 21. No. 21pp1-25;
- Wirartha, I Made. (2006). Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi. Penerbit Andi. Jakarta;
- Yatiman, Nur & Arif Pujiyono. (2013). Analisis Efisiensi Teknis Anggaran Belanja Sektor Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY tahun 2008-2010. *Diponegoro Journal of Economics*. Vol. 2. No. 1: pp1-13;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;